
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TINJAUAN UMUM

Kebijakan pemerintah untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah masing-masing atau lebih dikenal dengan otonomi yang diperluas memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dan pembangunan di daerah. Pembangunan saat ini tidak hanya dipusatkan di ibukota tetapi diharapkan juga sampai di daerah-daerah sehingga dampak dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menunjang kehidupan sosial dan ekonomi salah satunya dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Suatu Sistem transportasi yang menyeluruh dan lengkap sudah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan sistem transportasi merupakan salah satu faktor utama meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan suatu kota.

Jaringan jalan yang merupakan sarana utama transportasi darat menjadi sangat penting adanya, karena seperti kita ketahui jalan adalah urat nadi perekonomian, sedangkan ekonomi yang meningkat sangat diperlukan sebagai penunjang dalam pembangunan. Jembatan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jaringan jalan itu sendiri, ikut pula berperan. Jalan yang baik tidak ada artinya apabila jembatan-jembatan yang ada di ruas jalan tersebut belum memadai sesuai dengan kebutuhannya.

Dewasa ini keadaan jaringan jalan di Indonesia masih ditandai oleh adanya kemacetan – kemacetan lalu lintas , terutama didaerah –daerah yang sudah berkembang seperti di kota-kota besar. Terbaurnya peranan fungsi jalan arteri ,

kolektor dan lokal , menyebabkan tingkat kepadatan arus lalu lintas juga semakin tinggi. Akibatnya jalan-jalan tersebut tidak berfungsi secara efisien. Salah satu alternatif pemecahannya yaitu dengan meningkatkan fasilitas dan kemampuan jaringan jalan , baik dengan membangun jalan baru , memperlebar ruas jalan yang sudah ada, meningkatkan kelas jalan dan dengan meningkatkan kemampuan jembatan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas.

1.2. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana kita ketahui , jalur utara merupakan jalur yang strategis yang menghubungkan kota Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, Rembang dan seterusnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menyebabkan arus lalu lintas pada jalur utara semakin padat. Ruas jalan Jepara – Tayu menghubungkan kota Kudus, Jepara , Tayu, Pati dan Juwana.

Dengan semakin bertambahnya kepadatan lalu lintas pada jalur Jepara – Tayu tersebut jembatan yang sudah ada dianggap tidak cukup lagi memenuhi kapasitas lalu lintas yang ada. Untuk itu dibangun jembatan lagi untuk menambah lajur yang diharapkan dengan adanya jembatan tersebut dapat mendukung arus lalu lintas pada jalur utara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekitar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

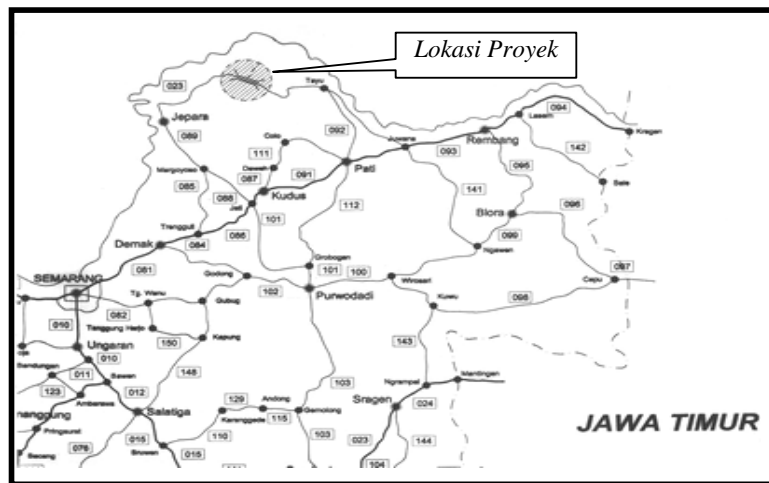
Maksud dan tujuan dari pembangunan Jembatan Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Membuka isolasi daerah utara dan menghubungkan wilayah Jepara dengan Tayu dan daerah-daerah di utara melalui jalur utara.
2. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung pembangunan wilayah utara Jawa Tengah, sehingga dapat lebih dikembangkan berbagai potensi wilayah tersebut (pariwisata, tambang , pertanian , dll.)

3. Menambah jalur alternatif untuk sistem jaringan lalu lintas sektoral maupun regional, khususnya di wilayah utara yang menghubungkan kota Semarang, Demak, Kudus, Jepara dan Rembang.
4. Menambah jumlah lajur untuk memenuhi kapasitas lalu lintas yang semakin padat.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Propinsi Jawa Tengah.

1.4. LOKASI PEKERJAAN

Pembangunan Jembatan Tarakan ini merupakan penggantian jembatan lama yang berlokasi di desa Kecamatan Tarakan , Kabupaten Jepara.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta lokasi di bawah ini :



Gambar 1.1. Peta lokasi jembatan

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN

Lingkup pembatasan masalah yang dibahas dalam perencanaan jembatan ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan trase / lokasi.
2. Pemilihan jenis struktur.
3. Aspek lalu lintas
4. Aspek hidrologi dan kesungai.
5. Aspek tanah.
6. Perhitungan struktur jembatan.
7. Penyusunan RAB yang meliputi Daftar Harga Bahan dan Upah , Daftar Analisa Harga Satuan , Rekapitulasi Biaya dan Jadwal Waktu Pelaksanaan.
8. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat meliputi Syarat-syarat Umum , Syarat-syarat Administrasi dan Syarat-syarat Teknis.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tugas akhir ini , terdiri atas delapan bab dengan beberapa sub bab yang dapat diperinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai tinjauan umum, latar belakang masalah, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II : STUDI PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai aspek arus lalu lintas, aspek hidrologi, aspek tanah, aspek konstruksi dan aspek pendukung.

BAB III : METODOLOGI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tahapan-tahapan perencanaan yang terdiri dari persiapan , pengumpulan data, analisa dan

pengolahan data, pemecahan masalah, penggambaran detail dan estimasi volume dan biaya pekerjaan.

BAB IV : ANALISA DATA

Bab ini membahas mengenai metode pengumpulan data , analisa data topografi , analisa data lalu lintas , analisa data hidrologi , analisa data tanah dan penentuan spesifikasi jembatan

BAB V : PERHITUNGAN KONSTRUKSI

Bab ini membahas mengenai hasil analisa data yang akan dihitung untuk perencanaan spesifikasi teknis bangunan dan perhitungan bangunan utama maupun bangunan penunjang atau tambahan.

BAB VI : RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

Bab ini berisi tentang syarat-syarat umum , syarat-syarat administrasi dan peraturan-peraturan teknis bagi kepentingan lelang pembangunan jembatan.

BAB VII: RENCANA ANGGARAN BIAYA

Bab ini berisi tentang daftar harga satuan upah dan bahan, daftar analisa harga satuan, perhitungan volume , *time schedule* dan *network planning*.

BAB VIII: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran –saran mengenai hasil –hasil perhitungan dan perencanaan struktur jembatan tersebut.